

EVALUASI MODEL CIPP PADA PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD

Ernawati¹, Muhammad Nur Akbar Rasyid², Sitti Mania³

Universitas Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email : ernawatisyafri954@gmail.com¹, akbar.rasyid@uin-alauddin.ac.id², sitti.mania@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk analisis komprehensif. Pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa, serta studi dokumentasi, yang dianalisis kualitatif dengan triangulasi data. Hasil evaluasi konteks menunjukkan program ini strategis untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesadaran serta penerimaan masyarakat terhadap keberagaman, meskipun terkendala fasilitas dan pelatihan. Evaluasi input mengidentifikasi berbagai faktor pendukung pelaksanaan program. Evaluasi proses menemukan bahwa pelaksanaan program masih memerlukan peningkatan konsistensi dan efektivitas. Sementara itu, evaluasi produk menunjukkan adanya peningkatan pada peserta didik, namun sistem penilaian dan pelaporan bagi siswa berkebutuhan khusus perlu disempurnakan. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kebijakan dan komitmen pemerintah, pelatihan sumber daya manusia untuk penyusunan kurikulum akomodatif dan Rencana Pembelajaran Individual (RPI), peningkatan fasilitas pendukung, pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, perbaikan sistem penilaian dan pelaporan, serta penguatan monitoring dan evaluasi program secara berkala oleh pengawas terlatih.

Kata Kunci: *Pendidikan inklusif, pendidikan berkualitas, Evaluasi, Model CIPP*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the inclusive education program at SD Negeri 2 Malino using the CIPP (Context, Input, Process, Product) model for comprehensive analysis. Data collection involved observation, interviews with the principal, teachers, students, and documentation studies, which were analyzed qualitatively with data triangulation. The results of the context evaluation showed that this program is strategic for expanding access to education and increasing public awareness and acceptance of diversity, despite being constrained by facilities and training. The input evaluation identified various supporting factors for program implementation. The process evaluation found that program implementation still requires increased consistency and effectiveness. Meanwhile, the product evaluation showed an increase in students, but the assessment and reporting system for students with special needs needs to be improved. Recommendations proposed include improving government policies and commitments, training human resources for the preparation of accommodative curricula and Individual Learning Plans (RPI), improving supporting facilities, developing a more flexible curriculum, improving the assessment and reporting system, and strengthening periodic program monitoring and evaluation by trained supervisors.

Keywords: *Inclusive Education, Quality Education, Evaluation, CIPP Model*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama yang tercantum dalam Pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Pendidikan menjadi sarana utama untuk mewujudkan cita-cita tersebut (Firnadi et al., 2022). Pendidikan yang diterapkan di Indonesia wajib dilaksanakan dengan cara yang demokratis, adil, serta bebas dari diskriminasi, sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



Sistem Pendidikan Nasional, yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 32, menyatakan bahwa pendidikan khusus disediakan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang dilaksanakan dengan pendekatan inklusif di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Fuadi, 2015). ABK adalah individu yang memiliki kondisi fisik, intelektual dan emosional yang lebih unggul atau lebih rendah dibandingkan dengan standar umum. Mereka membutuhkan pendidikan dan layanan bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan potensial mereka (Firnadi et al., 2022).

Perkembangan dan perubahan yang terjadi baru-baru ini menunjukkan kondisi yang sangat penting. Kelahiran dengan disabilitas bawaan masih dijumpai dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri. Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, jumlah anak dengan disabilitas telah terus meningkat. Semakin banyak anak yang lahir dengan cacat atau perkembangan pertumbuhan yang tidak normal secara fisik, mental, intelektual, maupun mental (Rosalina et al., 2020). WHO memperkirakan bahwa anak dengan disabilitas hingga tahun 2021, menunjukkan 17% dari jumlah penduduk Indonesia (Juhri, 2023).

Pendidikan inklusif adalah program yang bertujuan untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh akses pendidikan yang memadai, sekaligus memberikan kebebasan bagi mereka dalam memilih serta meningkatkan kemampuan diri sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki (Suryani, 2024). Setiap anak memerlukan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna.

Sekolah inklusif bertujuan mengintegrasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK) bersama siswa lainnya dalam lingkungan belajar yang sama. Untuk mewujudkan inklusivitas ini, perlu ada penyesuaian pada kurikulum karena kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) berbeda dari siswa pada umumnya. Untuk mewujudkan inklusi, kurikulum perlu disesuaikan mengingat kebutuhan siswa ABK yang berbeda dengan kebutuhan siswa secara umum. Sebagai dampaknya, kurikulum proses pembelajaran, penilaian, dan lingkungan belajar semuanya perlu disesuaikan (Aeny et al., 2022).

Pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK) hingga saat ini sebagian besar diterapkan melalui sistem pendidikan segregasi (Wijaya et al., 2023). Dalam Islam, kecacatan dipandang sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak menjadi alasan untuk membeda-bedakan manusia. Islam tidak menilai seseorang berdasarkan kondisi fisik, suku, atau warna kulit, melainkan dari budi pekerti serta ketakwaan Kepada Allah SWT, ajaran Islam mengajarkan kesetaraan, di mana setiap individu berhak dan bertanggung jawab secara setara, baik dalam hal hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat maupun kepada Allah SWT. Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, kelompok, atau kondisi fisiknya, berhak memperoleh pendidikan. Diskriminasi dalam pendidikan bertentangan menurut ajaran Islam. Hal ini diungkapkan dalam ayat Allah SWT yang terdapat dalam Surah Abasa, ayat 1-10 (Suharjo & Zakir, 2021).

Pendidikan inklusif masih menghadapi beberapa tantangan pada tahap pelaksanaannya. PDBK belum memenuhi kebutuhan prasarana pendukung yang diperlukan. Selain itu, kekurangan sumber daya pendukung seperti alat bantu pendengaran dan penglihatan juga akan menghambat perkembangan PDBK. Tenaga kerja yang tidak memadai akan mengganggu kemampuan sekolah untuk memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk PDBK. Partisipasi orang tua, yang memiliki peran krusial dalam kesuksesan pendidikan inklusi, belum terstruktur dengan baik (Yudhani, 2024).

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa, baik yang menghadapi hambatan fisik, emosional, mental, sosial, maupun yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat tertentu, mendapatkan kesempatan yang setara untuk menerima pengajaran yang berkualitas. Pengajaran tersebut dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan



kemampuan setiap siswa (Haryono, 2013). Program ini memberikan penekanan pada pemenuhan hak pendidikan untuk seluruh anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus.

Program inklusif didasarkan pada filosofi, hukum, pedagogik, dan empiris yang mendasari pelaksanaan pendidikan inklusif. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pendidikan inklusif mengikuti landasan yang kuat, baik secara hukum maupun prinsip dasar pendidikan (Suharjo & Zakir, 2021).

Anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat dibagi dalam beberapa kategori: (1) Kebutuhan Fisik: Anak-anak dengan keterbatasan penglihatan (tunanetra), gangguan kemampuan berbicara (tunarungu), dan masalah fungsi tubuh lainnya (tunadaksa); (2) Kebutuhan Mental: Anak-anak yang termasuk dalam kategori anak cerdas istimewa (berbakat luar biasa) atau yang memiliki kecerdasan mental terbatas (tunagrahita); (3) Kebutuhan Sosial: anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan perilaku dengan lingkungan mereka, sering disebut sebagai anak-anak dengan gangguan perilaku (Haryono, 2013).

Program inklusi dalam pendidikan adalah usaha untuk memastikan bahwa setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus menerima pendidikan berkualitas yang setara (Ilahi, 2009). Pendidikan inklusif menjadi semakin penting untuk memastikan kesetaraan dalam kesempatan pendidikan bagi semua anak. Ini mencakup usaha untuk mengatasi hambatan yang dapat menghalangi anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dapat memperoleh pendidikan yang tepat dan berkualitas. Dengan demikian, setiap anak harus diberikan kesempatan untuk diterima dalam lingkungan pendidikan yang mendukung mereka, dengan tujuan akhir untuk membangun masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif dan setara.

Adapun Studi sebelumnya, yaitu: (1) penelitian yang dilaksanakan oleh N.S Juntak yang berjudul Mewujudkan Pendidikan Universal: Penelitian tentang Penerapan Pendidikan Inklusif di Indonesia (Juntak et al., 2023); (2) Studi yang dilakukan oleh Fitriana Penilaian terhadap penerapan Pendidikan Inklusif di sekolah dasar yang terletak di daerah Koja, Jakarta Utara (Fitriana et al., 2022); (3) Studi yang dilakukan oleh Wijaya dan Supena dengan judul "Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Serang" (Wijaya et al., 2023); (4) Studi lainnya yang dilakukan oleh Faozanudin & Sulistian dengan judul "Tantangan dalam Pelaksanaan Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Banyumas." (Faozanudin & Sulistian, 2023).

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Interaksi dengan guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah; (2) Keterbatasan fasilitas sehingga diperlukan demi mendukung program sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Ini disebabkan oleh kurangnya kerja sama dari berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif dengan menggunakan model evaluasi Stufflebeam CIPP. Model ini terdiri atas empat aspek evaluasi yang saling berkaitan: Context, Input, Proses, dan Produk Untuk memperoleh informasi secara lengkap mengenai seberapa baik program Pendidikan yang bersifat inklusif dijalankan dan berhasil di SD Negeri 2 Malino. Penelitian ini akan melakukannya dengan menjelaskan dan mengevaluasi setiap aspek, meliputi konteks, input, proses, serta produk, kemudian membandingkannya mengikuti standar yang telah ditentukan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Evaluasi adalah penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data terkait objek evaluasi; melakukan penilaian dengan membandingkan terhadap indikator evaluasi; serta membuat keputusan mengenai nilai dan manfaat objek evaluasi berdasarkan hasilnya. Menurut Djuwita, Istilah "evaluasi" berasal dari bahasa Inggris "value," yang memiliki arti nilai (Djuwita, 2012). Penelitian ini memusatkan perhatian pada keuntungan model CIPP dalam evaluasi pendidikan inklusi. Berbagai model evaluasi itu terdiri dari berbagai model untuk memenuhi kebutuhan evaluasi program pendidikan secara keseluruhan.



Model-model ini termasuk Model Evaluasi Stake, Model Evaluasi CIPP, Model Evaluasi Perbedaan, dan Model Evaluasi CSE-UCLA. Menurut Suharsimi Arikunto, model CIPP dianggap sebagai model evaluasi terbaik karena melihat program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem (Haryono, 2013).

Model evaluasi yang diterapkan adalah Model CIPP (context, input, process, product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, yang mencakup empat komponen utama yang saling terhubung (Elwana, 2020). Pertama, evaluasi konteks bertujuan untuk menilai kelebihan dan kekurangan organisasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kedua, evaluasi input fokus pada membantu penentuan program yang dapat membawa perubahan yang diperlukan. Ketiga, evaluasi proses pada dasarnya bertujuan untuk menilai sejauh mana rencana diterapkan dengan baik. Keempat, Evaluasi produk bertujuan untuk menilai, menginterpretasikan, dan mengukur tingkat keberhasilan hasil yang dicapai dari program tersebut. Salah satu tujuan dari penerapan model CIPP adalah Untuk menilai apakah pendidikan inklusi telah dijalankan dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku pendidikan inklusi (Arni et al., 2021). Di Sekolah Dasar Negeri 2 Malino Tidak ada guru pendamping khusus (GPK) yang sangat berpengalaman di bidang pendidikan luar biasa (SLB). Ini pasti berdampak pada kualitas pendidikan dan proses pemberian layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat menerapkan kebijakan inklusif di sekolah dasar Negeri 2 Malino.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan program Pendidikan Inklusi di SD Negeri 2 Malino. Model CIPP digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami secara mendalam berbagai aspek program, mulai dari analisis kebutuhan dan landasan kebijakan (Konteks), ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya (Input), pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan interaksi (Proses), hingga capaian serta dampak dari program tersebut (Produk).

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk mencakup keempat dimensi evaluasi CIPP dengan melibatkan beragam sumber. Informasi pada dimensi Konteks digali dari pimpinan sekolah, guru, siswa berkebutuhan khusus, dan orang tua terkait kebijakan inklusi, kesesuaian visi-misi sekolah, serta identifikasi kebutuhan siswa. Pada dimensi Input, data diperoleh dari pimpinan sekolah, pendidik, dan dokumen terkait infrastruktur, kualifikasi pendidik, sumber daya pengajaran, pedoman program, serta alokasi anggaran. Dimensi Proses melibatkan observasi dan wawancara dengan pendidik serta murid mengenai implementasi program dan interaksi di kelas. Terakhir, dimensi Produk dievaluasi melalui data dari murid, pendidik, dan pimpinan sekolah terkait hasil belajar dan dampak program.

Berbagai teknik digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam dari sumber-sumber tersebut. Teknik utama meliputi wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, observasi partisipan dan non-partisipan terhadap fasilitas dan proses pembelajaran, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi sekolah (seperti kebijakan, visi-misi, kurikulum, catatan siswa, dan laporan anggaran). Selain itu, angket atau kuesioner juga disebarluaskan kepada siswa dan orang tua untuk memperdalam pemahaman mengenai kebutuhan siswa. Seluruh data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, dan keabsahannya diuji melalui teknik triangulasi sumber serta metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Copyright (c) 2025 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran



Evaluasi ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen dari berbagai sumber temuan utama dapat disimpulkan dari setiap komponen dalam model CIPP.

1. Tabel Evaluasi Komponen CIPP

Tabel 1. Hasil Evaluasi CIPP pada Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri 2 Malino

Komponen	Indikator Evaluasi	Temuan Utama
Context	Kebutuhan program, tujuan, dan sasaran	Program relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun kesadaran masih perlu ditingkatkan.
Input	Sumber daya, pelatihan guru, fasilitas	Fasilitas terbatas; pelatihan guru tidak konsisten.
Process	Pelaksanaan, pengawasan, keefektifan	Program berjalan tetapi konsistensi dan evaluasi berkala perlu ditingkatkan.
Product	Hasil, manfaat, dan dampak program	Meningkatkan akses pendidikan, tetapi sistem penilaian masih perlu pengembangan.

2. Tingkat Kepuasan Stakeholder

Grafik berikut menunjukkan tingkat kepuasan berbagai stakeholder terhadap program pendidikan inklusi berdasarkan wawancara:

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri 2 Malino

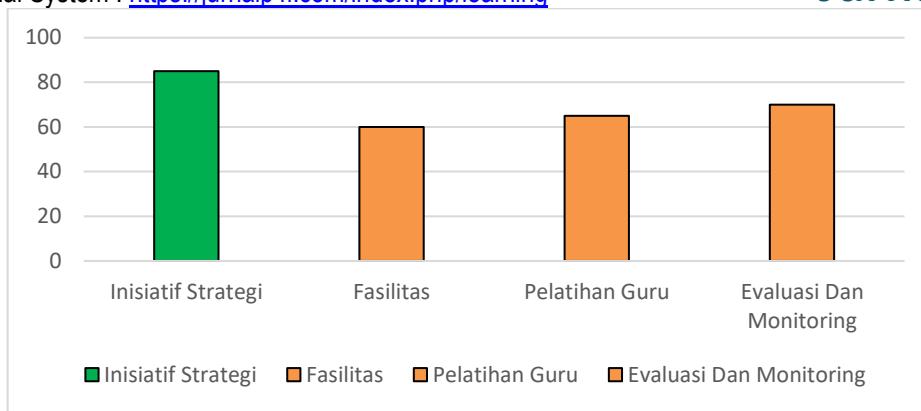
Stakeholder	Persentase Kepuasan	Deskripsi
Orang Tua	80%	Merasa puas karena anak-anak mereka mendapat akses pendidikan yang lebih baik.
Guru	65%	Mengakui program ini positif, tetapi memerlukan pelatihan tambahan.
Siswa	75%	Merasa diterima dalam lingkungan yang inklusif.

Deskripsi Verbal:

Orang tua menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 80%, terutama karena mereka melihat anak-anak mereka mendapat akses pendidikan yang lebih baik melalui program ini. Siswa mencatat tingkat kepuasan 75%, mengindikasikan bahwa mereka merasa diterima dan nyaman dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Namun, guru menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah, yaitu 65%, yang mencerminkan kebutuhan untuk pelatihan dan dukungan tambahan dalam melaksanakan program pendidikan inklusi.

3. Deskripsi Verbal Hasil Evaluasi

Evaluasi berdasarkan model CIPP menunjukkan bahwa program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino adalah langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, beberapa tantangan utama tetap ada, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta perlunya peningkatan sistem monitoring dan evaluasi.



Gambar 1. Evaluasi berdasarkan model CIPP terhadap program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino

Program ini merupakan inisiatif strategis yang signifikan (85%) untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, namun menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan fasilitas (60%) masih menjadi kendala yang perlu segera diatasi. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru (65%) menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan sumber daya manusia. Sistem monitoring dan evaluasi (70%) juga memerlukan peningkatan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program secara keseluruhan.

Pembahasan

1. Evaluasi Konteks

Menurut analisis berdasarkan temuan dan wawancara, aspek konteks perlu diperbaiki karena kebijakan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif masih merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, yang mengatur tentang pendidikan inklusif untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus serta kemampuan serta bakat luar biasa masih dianggap kurang memadai. Padahal, menurut Steniback yang dikutip oleh Sunardi, sekolah inklusi mengacu pada sekolah yang menyediakan fasilitas bagi semua siswa untuk belajar bersama dalam satu kelas, memberikan pendidikan yang sesuai dan menantang, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Menurut Edward III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada apakah struktur organisasi dan mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang telah ditetapkan dalam panduan program. Ketidakhadiran kebijakan tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan kegagalan dalam penerapan pendidikan inklusi.(Fitriana et al., 2022).

Dalam wawancara dengan kepala sekolah, beliau menyatakan bahwa "pendidikan inklusi merupakan beberapa diantara banyak program yang sangat kami dukung dan kami anggap penting. Tujuan utama kami adalah memberikan peluang sekolah inklusi memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang bisa dikembangkan meskipun ada perbedaan dalam cara mereka belajar". Hasil wawancara beberapa guru menambahkan bahwa "Pendidikan inklusi sudah menjadi bagian penting dari pendekatan kami dalam mengajar. Kami menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi yang khas, dan tugas kami sebagai pendidik adalah membantu mereka mengembangkan potensi tersebut, termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Program inklusi ini memungkinkan semua siswa, baik yang memiliki kekurangan atau kelebihan tertentu, belajar dalam satu kelas bersama, dengan pendekatan yang lebih personal."

Wawancara dengan dua siswa juga memberikan wawasan berharga. Siswa A yang merupakan siswa lambat belajar, menyatakan "pendidikan inklusi di sekolah ini bagus, karena



saya bisa belajar bersama teman-teman yang memiliki kemampuan berbeda. Kalau saya tidak mengerti pelajaran, teman-teman yang lain suka membantu, begitu juga dengan guru.” Siswa B menyatakan bahwa “pendidikan inklusi di sekolah ini sangat baik. Saya merasa tidak ada yang membuat saya berbeda dari teman-teman yang lain. Meskipun saya belajar agak lambat, saya merasa semua teman dan guru mendukung saya. Mereka memberi perhatian lebih dan tidak membuat saya merasa minder.”

Wawancara ini menegaskan bahwa program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino merupakan langkah penting, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti terbatasnya sumber daya dan fasilitas serta kurangnya keterampilan guru. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, program pendidikan inklusi dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam memperkuat pelaksanaannya dan memberikan manfaat positif bagi siswa.

Hasil observasi di lapangan menemukan bahwa visi misi sekolah dipajang di depan ruang kelas lengkap dengan tujuan dan sasaran pendidikan inklusi. Analisis kebutuhan siswa ABK menunjukkan bahwa program pendidikan inklusi mengidentifikasi jenis kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik dengan kebutuhan khusus lamban belajar.

2. Evaluasi Input

Evaluasi program inklusi pada aspek input dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yang mendukung kelancaran program ini meliputi infrastruktur yang tersedia. Faktor pertama adalah ketidaktersediaan dana untuk pelaksanaan pendidikan inklusi, termasuk untuk sarana pembelajaran anak berkebutuhan khusus dan pengembangan fasilitas inklusi. Kurangnya dukungan dana dan bantuan fisik dari pemerintah maupun swasta menghambat perkembangan anggaran pendidikan inklusi di sekolah. Hal ini menghalangi implementasi kebijakan, karena sumber daya seperti pengajar dan fasilitas sangat penting. Terbatasnya anggaran juga menjadi kendala dalam penerapan program-program khusus bagi anak berkebutuhan khusus, seperti identifikasi, asesmen, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa meskipun infrastruktur di SD Negeri 2 Malino sudah cukup mendukung pendidikan inklusi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, khususnya terkait aksesibilitas dan alat bantu belajar. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, dan berharap ada perbaikan bertahap serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan fasilitas tersebut..

Wawancara dengan guru PJOK mengungkapkan bahwa program pendidikan inklusi menghadapi tantangan dalam hal fasilitas, khususnya untuk kegiatan fisik siswa ABK. Siswa berkebutuhan khusus memerlukan ruang yang memadai dan alat bantu untuk mendukung pembelajaran olahraga mereka. Tanpa fasilitas tersebut, sangat sulit memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Wawancara dengan siswa A mengungkapkan bahwa program inklusi sangat membantu, namun kadang alat atau media yang dibutuhkan tidak tersedia. Siswa B juga setuju, mengungkapkan bahwa mereka kesulitan mengikuti pelajaran dan membutuhkan lebih banyak waktu serta alat bantu yang belum tersedia.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa program inklusi di SD Negeri 2 Malino berjalan dengan baik, meskipun masih ada keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang perlu diperbaiki. Penambahan fasilitas aksesibilitas dan alat bantu belajar untuk siswa ABK akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, pelatihan tambahan bagi guru diperlukan agar mereka lebih siap mengelola kelas inklusi dan memberikan perhatian sesuai kebutuhan setiap siswa.

Berdasarkan analisis dokumen, SD Negeri 2 Malino sudah memiliki beberapa fasilitas yang mendukung program pendidikan inklusi, seperti ruang kelas yang aksesibel untuk ABK



dan toilet ramah disabilitas. Namun, masih ada kekurangan dalam penyediaan alat bantu belajar canggih, perbaikan aksesibilitas di luar sekolah, dan pengelolaan anggaran untuk fasilitas inklusi. Selain itu, pelatihan lebih lanjut bagi guru dan staf mengenai pengelolaan dan penggunaan infrastruktur pendidikan inklusif masih dibutuhkan.

Faktor kedua yaitu Kualifikasi pendidik dalam mengajar anak ABK. Guru pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa memainkan peran kunci dalam menyediakan layanan transisi bagi siswa dengan kebutuhan khusus.(Azizah, 2016). Kemampuan guru dalam menyampaikan materi kepada anak berkebutuhan khusus memegang peranan penting, karena hal tersebut berdampak langsung pada tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran. Selain itu, keterampilan yang mumpuni dalam mengajarkan materi kepada ABK sangat dibutuhkan, mengingat adanya keterbatasan dalam kemampuan, daya ingat, serta kondisi fisik yang dimiliki oleh mereka. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi tersebut.(Rahayuni, 2019)

Menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah, beliau menyatakan bahwa "Kualifikasi pendidik memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Saat ini, di sekolah kami, beberapa guru telah memiliki pemahaman dasar mengenai pendidikan inklusi. Namun, secara keseluruhan, masih terdapat kekurangan dalam hal penguasaan pengetahuan yang lebih mendalam dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengajar ABK, terutama terkait penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka."

Wawancara dengan guru Pendais mengungkapkan bahwa kesiapan guru merupakan tantangan besar. Guru merasa perlu pemahaman lebih mendalam tentang cara mengajar siswa berkebutuhan khusus dan kompetensi dalam menyusun Rencana Pembelajaran Individu (RPI) serta memodifikasi materi pelajaran. Namun, mereka merasa belum sepenuhnya siap dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ABK, terutama yang lambat belajar.

Berdasarkan Hasil observasi terhadap Kualifikasi pendidik menunjukkan bahwa dalam mengajar anak berkebutuhan khusus sudah cukup memadai, namun masih ada beberapa kendala. Guru kelas sudah mengaplikasikan beberapa strategi inklusif meskipun pelatihan lebih lanjut dalam merancang Rencana Pembelajaran Individual (RPI) dan penggunaan alat bantu diperlukan. Guru mapel, seperti Pendais dan PJOK, menunjukkan kesediaan untuk berkolaborasi, tetapi masih perlu pelatihan khusus dalam mengadaptasi pembelajaran agar lebih inklusif.

Analisis dokumen menunjukkan bahwa mayoritas guru di SD Negeri 2 Malino tidak memiliki kualifikasi pendidikan khusus dalam bidang pendidikan inklusi. Beberapa guru telah mengikuti pelatihan inklusi, namun masih membutuhkan pelatihan lanjutan dan sertifikasi. Guru-guru menunjukkan kompetensi dasar dalam mengajar ABK, namun perlu pengembangan keterampilan lebih lanjut dalam pengelolaan kelas inklusi dan penggunaan teknologi pendidikan. Meskipun ada program pengembangan karir untuk guru, fokusnya lebih pada pengajaran umum daripada pengajaran untuk ABK.

Faktor ketiga yaitu Sumber daya penganggaran. Ketidaktersediaan dana dan penganggaran untuk pelaksanaan pendidikan inklusi, seperti alokasi dana untuk pembelian sarana pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan kemampuan belajar yang lambat, serta pembangunan dan penyediaan fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif, Hal ini menjadi sebuah permasalahan. Selain itu, kurangnya dukungan dana atau bantuan barang fisik, keterbatasan dukungan dari pemerintah maupun sektor swasta menghambat pengalokasian anggaran untuk pendidikan inklusi di tingkat sekolah. Kondisi ini menghalangi implementasi pendidikan inklusif, karena, menurut Edward III, sumber daya seperti tenaga pengajar dan fasilitas sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Terbatasnya



anggaran untuk siswa berkebutuhan khusus juga menjadi kendala. juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan, terutama untuk program-program yang dirancang khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus, seperti proses identifikasi dan asesmen, kegiatan ekstrakurikuler, dan lainnya.

Wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa anggaran untuk program pendidikan inklusi di sekolah masih memiliki keterbatasan. Saat ini, sekolah belum menyediakan dana khusus untuk pengadaan alat bantu belajar bagi siswa berkebutuhan khusus, terutama yang lambat belajar. Selain itu, mereka kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas yang cukup memadai untuk mendukung pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

Wawancara dengan guru kelas, guru Pendais, dan guru PJOK mengungkapkan bahwa penganggaran untuk pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino masih kurang optimal. Guru kelas menilai fasilitas penunjang untuk siswa berkebutuhan khusus terbatas, sementara guru Pendais menyoroti perlunya dana tambahan untuk bahan ajar khusus, seperti buku braille dan materi audio. Guru PJOK juga mengungkapkan pentingnya alokasi anggaran untuk alat olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa disabilitas, serta peningkatan fasilitas fisik untuk mendukung aktivitas olahraga mereka.

Hasil observasi menunjukkan bahwa SD Negeri 2 Malino belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusi, seperti ruang keterampilan diri, ruang sumber, ruang latihan fisik, ruang remedial, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh siswa lambat belajar. Saat ini, fasilitas yang ada belum dilengkapi dengan alat atau media yang diperlukan, sehingga tidak dapat mendukung optimalnya pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Kekurangan sarana ini juga terjadi di hampir semua sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Analisis dokumen menunjukkan bahwa SD Negeri 2 Malino menghadapi keterbatasan anggaran untuk program pendidikan inklusi. Dana yang tersedia hanya mencakup sebagian kecil dari anggaran tahunan, dengan sebagian besar digunakan untuk alat bantu pendidikan dasar dan pemeliharaan fasilitas. Sumber dana utama berasal dari dana BOS dan komite sekolah, namun jumlahnya terbatas untuk mencakup semua kebutuhan. Pengelolaan anggaran perlu diperbaiki agar lebih efisien dan transparan, serta mencakup kebutuhan khusus pendidikan inklusi, seperti pelatihan guru dan fasilitas yang lebih baik. Meskipun pengembangan infrastruktur telah dilakukan, masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, terutama dalam penyesuaian ruang kelas dan penyediaan teknologi bantu.

Faktor keempat yaitu Pedoman pengembangan program pendidikan inklusi. Pedoman umum pendidikan inklusif disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif. Seiring dengan perhatian Pemerintah yang semakin besar terhadap pendidikan inklusif, pedoman ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia.(Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2011).

Menurut keterangan kepala sekolah dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa "Pedoman pengembangan program pendidikan inklusi sangat penting, terutama untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pedoman ini menjadi panduan bagi sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Tanpa pedoman, sekolah akan kesulitan menentukan langkah yang tepat dalam mengelola program pendidikan inklusi."

Wawancara dengan guru kelas menunjukkan bahwa pedoman pengembangan pendidikan inklusi sangat membantu dalam memahami cara mengajar siswa berkebutuhan khusus, terutama dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Individual (RPI). Namun, guru merasa pedoman tersebut masih perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan didukung



pelatihan tambahan. Guru Pendais juga mendukung pedoman ini, namun menekankan perlunya pendekatan khusus dalam mengajar nilai agama untuk siswa berkebutuhan khusus. Sementara itu, guru PJOK menganggap pedoman inklusi penting untuk memastikan siswa berkebutuhan khusus terlibat dalam aktivitas sekolah, namun menginginkan panduan lebih spesifik untuk menyesuaikan aktivitas fisik dengan kebutuhan mereka.

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun sekolah sudah memiliki pedoman pendidikan inklusi, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Guru dan staf membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memahami dan menerapkan pedoman dengan efektif. Selain itu, fasilitas pendukung perlu diperbaiki agar pendidikan inklusi dapat berjalan optimal, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat perlu diperkuat melalui sosialisasi dan edukasi.

Berdasarkan analisis dokumen, sekolah telah memiliki pedoman pendidikan inklusi yang sesuai dengan peraturan pemerintah, namun implementasinya masih kurang, terutama dalam penyusunan RPI dan evaluasi program. Pedoman tersebut perlu diperbarui dan disosialisasikan kepada seluruh guru untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi.

Rekomendasi yang diajukan meliputi: pembaruan pedoman pendidikan inklusi yang memperhatikan kebutuhan siswa dan tantangan sekolah; sosialisasi pedoman kepada seluruh guru dan staf agar dapat diterapkan dengan baik; penyusunan format seragam untuk RPI dan memastikan guru dapat menyusunnya dengan benar; serta peningkatan sistem evaluasi dan monitoring program inklusi dengan instrumen yang lebih rinci untuk memperoleh hasil evaluasi yang akurat sebagai dasar perbaikan program.

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino memiliki potensi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan program pendidikan inklusi, dan hasil analisis dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengembangan program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino.

3. Evaluasi Proses

Penilaian terhadap aspek proses program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino fokus pada perbaikan pembelajaran, karena proses pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus, terutama yang lambat belajar, belum mencapai standar pendidikan inklusi. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa guru belum menyusun atau menerapkan Rencana Pembelajaran Individu (RPI) dan pembelajaran masih belum disesuaikan dengan kurikulum yang bersifat akomodatif. Materi yang diajarkan masih mirip dengan materi untuk siswa reguler. Selain itu, kurangnya kolaborasi dan ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga menjadi kendala. Sekolah juga belum menyediakan program untuk pengembangan keterampilan dan bakat bagi siswa berkebutuhan khusus yang lambat belajar, serta belum ada program kompensatoris yang mendukung mereka, yang menghambat keberhasilan pendidikan inklusi.(Fitriana et al., 2022)

Hasil Wawancara dengan guru kelas mengungkapkan bahwa mereka mengakui belum sepenuhnya menyusun Rencana Pembelajaran Individual (RPI) untuk setiap siswa ABK, karena keterbatasan waktu dan pemahaman mengenai cara menyusunnya. Guru juga merasa kurangnya pelatihan atau bimbingan terkait pembuatan dan pelaksanaan RPI.

Wawancara dengan siswa A mengungkapkan bahwa ia merasa kesulitan mengikuti pelajaran karena materi yang diajarkan sama dengan teman-temannya, meskipun ia merasa kesulitan untuk memahami dan membutuhkan waktu lebih. Ia juga mengungkapkan tidak ada bantuan khusus untuk membantunya. Siswa B juga merasakan kesulitan yang sama, merasa materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhannya dan menginginkan pendekatan yang berbeda.

Evaluasi proses mengungkapkan bahwa implementasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala



dalam integrasi siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas regular. Pengamatan menunjukkan bahwa adanya keterbatasan waktu untuk menyesuaikan pembelajaran, menciptakan interaksi yang baik antara siswa berkebutuhan khusus dan siswa lainnya tanpa kebutuhan khusus serta kurangnya Program Pengembangan Keterampilan dan Bakat.

Hasil Wawancara dengan guru dan siswa memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas program inklusi, antara lain: guru menyarankan variasi metode pembelajaran, siswa mengusulkan penjelasan materi yang lebih mudah dipahami, dan kepala sekolah mengusulkan keterlibatan orang tua melalui pertemuan berkala untuk berbagi informasi tentang perkembangan anak ABK.

Hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen mengungkapkan bahwa pembelajaran di SD Negeri 2 Malino perlu perbaikan signifikan agar memenuhi standar pendidikan inklusi, terutama bagi siswa dengan kecepatan belajar lambat. Dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan terstruktur, pelatihan untuk guru, penyesuaian kurikulum, serta peningkatan sumber daya untuk mendukung pendidikan inklusi secara maksimal.

Implementasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino telah dijalankan, namun masih perlu peningkatan dalam konsistensi dan efektivitas. Kendala utama termasuk ketidaksempurnaan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembelajaran Individual (RPI) untuk siswa ABK, kurikulum yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan siswa ABK, terutama yang lambat belajar, serta kurangnya kolaborasi antara guru kelas dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) karena ketidakhadiran GPK di sekolah.

Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program, beberapa usulan perbaikan yang diajukan antara lain: (1) Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi guru dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembelajaran Pribadi (RPP) yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK; (2) Mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan akomodatif, sesuai dengan kemampuan siswa ABK, terutama yang lambat belajar; (3) Menyediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk memastikan siswa ABK mendapatkan bimbingan yang tepat; (4) Membuat program pengembangan keterampilan khusus untuk mengasah minat dan bakat siswa ABK di luar aspek akademik; (5) Melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran inklusi; (6) Melakukan evaluasi berkala terhadap program pendidikan inklusi dengan melibatkan umpan balik dari siswa ABK, orang tua, dan guru.

4. Evaluasi Produk

Evaluasi produk pada program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan pada sistem penilaian dan pelaporannya karena masih menggunakan standar penilaian yang belum memenuhi kriteria minimum program terlihat dari tidak adanya penetapan SKL dan KKM yang spesifik bagi siswa dengan kebutuhan belajar lambat, dan kurangnya prosedur yang jelas dalam menetapkan Nilai KKM untuk siswa dengan kebutuhan khusus yang lambat belajar.

Sistem pelaporan dan kebijakan khusus mengenai pengulangan kelas untuk anak-anak berkebutuhan khusus masih belum diterapkan dengan baik sehingga perlu diperbaiki. Karena masih menerapkan kebijakan pengulangan kelas yang tidak membedakan antara anak dengan kebutuhan khusus dan anak pada umumnya, sebagian besar guru telah melakukan penyesuaian dalam teknik atau strategi penilaian, seperti dengan menerapkan penilaian portofolio, tes yang dimodifikasi, dan penilaian berbasis kinerja, sehingga siswa dengan kebutuhan khusus dapat memenuhi KKM.

Sistem pelaporan hasil belajar (rapor) menurut pedoman pendidikan inklusi seharusnya mencakup angka serta deskripsi tertulis tentang penguasaan materi. Berdasarkan wawancara dan observasi, pelaporan hasil evaluasi di kelas sudah menyertakan komentar naratif, bukan hanya angka. Namun, laporan ini hanya diberikan saat pembagian rapor dan biasanya hanya jika ada masalah. Beberapa guru memberikan laporan perkembangan siswa berkebutuhan



khusus kepada orang tua, tetapi hanya dua kali dalam setahun. Hal ini bertentangan dengan pendapat Tarmansyah (2007) yang menyatakan bahwa siswa seharusnya menerima laporan hasil belajar secara berkala, dan siswa yang belum mencapai KKM harus mengikuti program remedial.

Penentuan Standar Kriteria Kelulusan (SKL) untuk siswa berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Berdasarkan Pedoman Umum Pendidikan Inklusi, sekolah diwajibkan menyesuaikan SKL bagi siswa berkebutuhan khusus sesuai usia kronologis mereka. Berdasarkan wawancara dan observasi, sekolah telah menetapkan SKL khusus untuk memastikan kelanjutan pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Meskipun proses belajar mereka lebih lambat, banyak siswa dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya karena mereka mengikuti ujian dan lulus setiap tahunnya, serta mendapatkan ijazah untuk melanjutkan pendidikan. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa guru masih kurang siap dalam menyusun kurikulum yang dimodifikasi dan merancang Rencana Pembelajaran Individu (RPI) yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang memiliki kecepatan belajar lebih lambat.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah serta dua orang guru mata pelajaran, terungkap pandangan mengenai program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino. Guru Pendais menyatakan bahwa pendidikan inklusi telah membawa perubahan positif, terutama dalam pelajaran agama dan budi pekerti, di mana nilai-nilai moral dan sosial yang mengajarkan saling menghargai dan memahami perbedaan lebih ditekankan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan inklusi, yang mengajarkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Guru PJOK menambahkan bahwa pendidikan inklusi sangat penting, terutama dalam pelajaran olahraga, karena setiap siswa harus terlibat dalam kegiatan fisik untuk mengembangkan keterampilan motorik dan membangun kepercayaan diri. Dia merasa senang melihat siswa berkebutuhan khusus aktif dalam berbagai kegiatan, yang memberikan peluang yang setara bagi mereka untuk berkembang fisik dan sosialnya.

Berdasarkan berbagai tantangan yang ditemukan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan pihak sekolah untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi antara lain: (1) Memberikan surat penunjukan kepada sekolah sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) dan memastikan program tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan, rencana kerja, kurikulum, dan RAPBS; (2) Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan inklusi, khususnya untuk anak dengan kesulitan belajar, serta memastikan keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di setiap sekolah; (3) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi dengan melibatkan pengawas wilayah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi; (4) Guru perlu menyusun kurikulum yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak dengan kesulitan belajar dan mengimplementasikan Rencana Pembelajaran Individu (RPI); dan (5) Memperbaiki kebijakan pelaporan dan kelanjutan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa guru belum sepenuhnya siap dalam merancang kurikulum yang dimodifikasi dan menyusun RPI, yang menjadi tantangan dalam memberikan layanan optimal bagi siswa dengan kesulitan belajar. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya fokus pada cara-cara agar guru dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam merancang kurikulum dan RPI yang disesuaikan.

Adapun rekomendasi yang sediakan antara lain:(1) Peningkatan Kebijakan dan dukungan Institusional;(2) Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM);(3) Peningkatan fasilitas dan infrastruktur;(4) Pengembangan kurikulum dan pembelajaran;(5) Penguatan sistem penilaian dan pelaporan;(6) Perbaikan dalam monitoring dan evaluasi; (7) Peningkatan partisipasi dan kolaborasi



Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri 2 Malino dapat dioptimalkan penyelenggaranya, dengan memberikan pendidikan yang lebih bermutu, serta memastikan bahwa setiap peserta didik, terutama anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterlambatan dalam belajar, memiliki peluang untuk berkembang dan mencapai potensi serta kemampuan terbaik yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi CIPP, program pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Malino menunjukkan adanya landasan kebijakan yang kuat namun implementasinya masih terkendala secara signifikan. Kekurangan sumber daya input seperti tenaga pendidik terlatih, fasilitas memadai, dan anggaran optimal menjadi penghambat utama. Proses pelaksanaan program juga belum sesuai standar, terutama dalam kolaborasi guru kelas dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang bahkan tidak tersedia, serta minimnya penyesuaian kurikulum dan Rencana Pembelajaran Individual (RPI) untuk siswa berkebutuhan khusus, yang berdampak pada hasil belajar siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Secara keseluruhan, sekolah dinilai belum sepenuhnya siap dalam berbagai aspek krusial seperti kurikulum, anggaran, kompetensi guru, proses pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarana.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, serangkaian rekomendasi diajukan. Diperlukan penegasan kebijakan dan dukungan pemerintah, termasuk penunjukan resmi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan guru dalam penyusunan kurikulum akomodatif dan RPI, penambahan fasilitas pendukung, serta pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel menjadi prioritas. Dari sisi proses, perbaikan metode penilaian bagi siswa berkebutuhan khusus dan peningkatan sistem monitoring evaluasi dengan melibatkan pengawas terlatih sangat direkomendasikan. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan seperti minimnya tenaga pendidik terlatih, fasilitas, waktu, dan pembiayaan, implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program inklusi di SD Negeri 2 Malino, terutama bagi siswa lamban belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- A Yudhani, H. K. (2024). The implementation of inclusive education policy at the elementary school level. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9.
- Aeny, A. N., et al. (2022). Analisis dan evaluasi: Program pendidikan inklusi melalui sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 118–126. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/495>
- Azizah, N. (2016). Kompetensi guru pendidikan khusus dalam pendidikan transisi. *JPK: Jurnal Pendidikan Khusus*, 12(1), 1–12.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2011). *Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif* (Publikasi No. 70). Departemen Pendidikan Nasional.
- Djuwita, W. (2012). *Evaluasi pembelajaran*. El Hikam Press Lombok.
- Faozanudin, M., & Sri Sulistian, L. (2023). Tantangan implementasi pendidikan dasar inklusi di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Indopedia (Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan)*, 1(1), 107–118.
- Firnadi, A., et al. (2022). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menggunakan model CIPP di sekolah dasar Kota Bengkulu. *Annizom*, 7(3), 209–219. <https://doi.org/10.29300/nz.v7i3.8858>
- Fitriana, F., et al. (2022). Evaluasi pendidikan inklusi di sekolah dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 5(2), 191–200. <https://doi.org/10.30605/jsgp.5.2.2022.1677>



- Fuadi, K. (2015). Analisis kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta. *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, 11(1), 1–28.
- Haryono, G. N. (2013). Studi evaluasi program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar Kabupaten Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 1–18.
- Ilahi, M. T. (2009). *Pendidikan inklusif konsep & aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Juhri. (2023). Evaluasi program pendidikan inklusif pada sekolah dasar. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2(4), 425–431. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v2i4.1916>
- Juntak, J. N. S., et al. (2023). Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214.
- Rahayuni, W. (2019). Kemampuan guru kelas dalam mengajar anak berkebutuhan khusus berkesulitan belajar pada program inklusi. *Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 81–88. <https://doi.org/10.30595/dinamika.v9i2.4040>
- Rosalina, D., et al. (2020). Factors affecting intention in accounting study program students choosing the public accountant profession. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(1), 86–95.
- Suharjo, S., & Zakir, S. (2021). Evaluasi program pendidikan inklusif di sekolah dasar menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). *Sultra Educational Journal*, 1(3), 51–59. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.201>
- Suryani, B. A. (2024). Pengembangan pendidikan dengan pendekatan berdiferensiasi melalui metode peer teaching dalam kerangka kurikulum merdeka. [Nama Jurnal Tidak Dicantumkan], 9.
- Wijaya, S., et al. (2023). Implementasi program pendidikan inklusi pada sekolah dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 347–357. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>